

## Inovasi Dalam Mewujudkan Banjarmasin Barasih Wan Nyaman



<https://arjigibs.wordpress.com/2015/08/06/budaya-makanan-dan-ciri-khas-banjarmasin/>

Saat ini ada beberapa inovasi yang dilakukan Pemkot [Banjarmasin](#) dalam mengelola lingkungan. Tujuannya, mewujudkan visi "Baiman" yaitu Banjarmasin Barasih wan Nyaman. Inovasi itu seperti upaya mereduksi sampah dengan memberdayakan 196 bank sampah, yang setiap bank sampah minimal mampu mereduksi rata-rata 1,5 ton per bulan dengan omset rata-rata 2,5 juta per bulan.

“Sejak 2016 Banjarmasin telah membentuk Bank Sampah Induk dan telah mengurangi penggunaan plastik dengan cara mengeluarkan Perwali nomor 18 tahun 2016 tentang Larangan Penggunaan Plastik di pasar modern dan mini market per 1 juni 2016,” ucap Ibnu Sina dihadapan Tim Penilai Adipura, Kemen LH di Jakarta, Sabtu (10/6/2017). Dengan adanya Perwali Nomor 18 tahun 2016 tentang Larangan Penggunaan Plastik di pasar modern dan mini market itu, lanjutnya, maka jumlah pengurangan kantong plastik di Kota Banjarmasin mencapai 51.295.445 lembar per bulan.

Tak hanya itu, Ibnu Sina juga menjelaskan tentang keberadaan 14 TPST milik Pemkot Banjarmasin yang membantu mengurangi sampah hingga sekira 4.045 ton per bulan. Hal lain yang juga menjadi fokus dalam materi presentasi orang nomor satu di Kota Banjarmasin itu

tentang keberadaan taman vertikal, pemeliharaan dan pembersihan sungai dengan menggunakan Kapal Biyuku dan Kapal Sapu-Sapu, kemudian pembentukan PD PAL sejak tahun 2006, pembangunan sanimas di 39 titik dan 14 titik IPAL Komunal dengan 700 sr.

“Upaya pengendalian pencemaran udara juga kami lakukan dengan cara melaksanakan kegiatan Car Free Day, memberlakukan angkutan BBM yang lulus uji emisi, kemudian uji emisi kendaraan bermotor, lalu uji emisi terhadap kegiatan sumber bergerak tidak bergerak, dan pemantauan kualitas udara di 5 titik sebanyak 2 kali setahun,” katanya.

Untuk inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banjarmasin, katanya lagi, saat ini telah dibangun TPA di kawasan Basirih dengan system control land fill. “Gas methane-nya digunakan untuk pembangkit listrik PJU disekitar TPA dan dimanfaatkan sebagai pengganti LPG oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar TPA,” terang suami dr Siti Wasilah ini.

Program lain yang juga dijelaskan Ibnu Sina saat itu adalah tentang program menuju sustainable city, penetapan kawasan pertanian berkelanjutan, penyiapan Bus Rapid Transport (BRT) dan pembangunan jalur kereta api, program green building (khususnya perkantoran pemerintah), mengembangkan tanaman hidroponik, penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), lomba angkat lumpur, lomba maharagu (memelihara) sungai, mengembangkan transportasi sungai, pemberlakuan aturan tentang bangunan panggung, pengembangan pasar sehat di tiga pasar percontohan dan menetapkan garis sempadan sungai.

(Diringkas dari <https://www.beritabanjarmasin.com/2017/06/keren-inilah-inovasi-pemkot-banjarmasin.html>)

Dalam artikel yang berbeda disampaikan, Bank sampah induk “Baiman” di Banjarmasin, Kalimantan Selatan membuat jangkauan layanan yang lebih luas, yakni menyediakan layanan jemput bagi masyarakat yang ingin menyedekahkan sampah yang ada nilai ekonomisnya. “Bank sampah kita mengembangkan adanya layanan jemput, di mana ini akan digerakkan pada 2020,” ujar Direktur Bank Sampah Induk “Baiman” Banjarmasin Fathurrahman di Banjarmasin, Sabtu.

Layanan ini sifatnya bagi masyarakat yang ingin mersedekahkan sampahnya, seperti rongsokan elektronik, bangku atau meja dan lain sebagainya karena tidak bisa mendaur ulang atau ketiadaan bank sampah di wilayahnya. “Hubungi saja bank sampah kita, pasti kita jemput, bahkan kita bisa gunakan pick up,” tuturnya.

Ini sebenarnya, ungkap inisiator bank sampah di ibukota provinsi Kalsel ini, sudah pihaknya uji coba di wilayah kompleks perumahan elit, di mana cukup banyak yang menyumbangkan sampahnya, yang bisa bernilai ekonomis kalau di daur ulang. “Karena kan dari pada jadi rongsokan yang tidak jelas lagi bisa dimanfaatkannya, daripada dibuang begitu saja, lebih baik disedekahkan ke bank sampah,” tutur Fathurrahman yang dulunya Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel ini. Karena menurut dia, barang-barang rongsokan yang disumbangkan atau disedekahkan ke bank sampah itu, misalnya bangku dan meja, akan bisa dibuat kembali dengan baik oleh tim kreatif bank sampah induk. “Nantinya bisa kita sumbangkan lagi ke panti asuhan atau tempat yang memerlukan lainnya, untuk panti sosial,” paparnya.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/20/dinas-pertanian-banjarmasin-minta-anggaran-rpc25-miliar-bangun-rpu-semi-mekanis.>)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.beritabanjarmasin.com/2017/06/keren-inilah-inovasi-pemkot-banjarmasin.html>, Minggu, 11 Juni 2017
2. <https://teraskota.id/2019/12/bank-sampah-induk-banjarmasin-buat-layanan-jemput-sedekah-sampah/>, 14 Desember 2019

#### **Catatan:**

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

#### Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Rincian Program Pembangunan

##### Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

#### Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguana Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi

berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.

- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi,

perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.

- Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.